



► MASALAH LINGKUNGAN

Timbunan Sampah Harus Selesai Sebelum Nataru

JOGJA—Sekitar 1.000 ton sampah menumpuk di sejumlah depo di Kota Jogja. Kondisi ini terjadi lantaran terbatasnya kuota pembuangan sampah ke TPST Piyungan.

Stefani Yulindriani & Ariq Fajar Hidayat
redaksi@harianjogja.com

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja menyatakan pengangkutan akan dilakukan secara bertahap dan diupayakan selesai sebelum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kota Jogja, Ahmad Haryoko, menjelaskan Kota Jogja hanya mendapat

► **Kuota 300 ton per minggu tidak bisa maksimal untuk mengurangi tumpukan sampah di depo**

► **Penertiban pembakaran sampah ilegal harus disertai pendampingan bagi masyarakat.**

jatah 300 ton sampah per minggu untuk dibuang ke TPST Piyungan. "Kuota 300 ton per minggu tidak bisa maksimal untuk mengurangi tumpukan sampah di depo," ujarnya, Kamis (20/11)

Ahmad menyebut saat ini terdapat 1.060 ton sampah yang berada di depo dan belum bisa diangkut. "Secara bertahap tetap dibuang ke TPST Piyungan," katanya.

Menurutnya, produksi sampah harian

di Kota Jogja mencapai 260–300 ton per hari. Sementara, kapasitas seluruh TPS3R di Kota Jogja hanya mampu mengolah sekitar 190 ton per hari. Artinya, setiap hari masih ada 70–110 ton sampah yang tidak dapat diselesaikan di TPS3R. "Kami usahakan sampah yang belum dapat diolah tidak melebihi 300 ton per minggu," ujar Ahmad.

Meski demikian, ia belum dapat memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menuntaskan timbunan sampah tersebut. "Diupayakan sebelum libur Nataru bersih," katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kusno Wibowo, menegaskan daya dukung dan daya tampung pengelolaan sampah di DIY sudah mencapai batas maksimal. Mulai 2026, pihaknya tidak lagi bisa

melakukan evakuasi sampah seperti mekanisme saat ini. "Daya dukungnya sudah tidak memungkinkan, sehingga tidak ada tambahan kuota lagi," katanya.

Dia menyebut hingga akhir 2025 proses penataan di TPST Piyungan masih berlangsung, termasuk antisipasi peningkatan sampah di momen pergantian tahun. Setelah itu, pola evakuasi tidak akan lagi sama dan daerah harus mengandalkan pengurangan sampah dari hulu serta penguatan pengolahan mandiri.

Pembakaran Ilegal

Sementara, menjelang ditutupkan TPST Piyungan mulai 1 Januari 2026, DPRD DIY menyoroti maraknya pembakaran sampah ilegal di sekitar Piyungan. Jika terus dibiarkan, kondisi ini bisa merusak kualitas udara.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Amir Syarifudin, menekankan perlunya perhatian serius terhadap dampak langsung penutupan TPST bagi warga sekitar.

Amir, yang merupakan warga sekitar TPST Piyungan, menyampaikan selama puluhan tahun warga di sekitar TPST hidup dalam kondisi udara yang tercemar bau sampah. Kondisi tersebut mulai membaik seiring adanya pembatasan. Namun, persoalan baru muncul, termasuk pembakaran sampah ilegal.

"Pembakaran sampah ilegal harus ditertibkan," ujar Amir, Rabu (19/11).

Menurutnya, penertiban pembakaran sampah ilegal harus disertai pendampingan bagi masyarakat. Menurutnya, masyarakat hanya menginginkan solusi sederhana agar kualitas udara tetap terjaga.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005